

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara kepulauan dan telah dikenal sebagai negara maritim. Memiliki luas perairan yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Oleh karena itu Indonesia memiliki keuntungan komparatif dibandingkan dengan negara lainnya dari segi sumber daya alam. Selain itu pula Indonesia memiliki keuntungan sumber daya manusia karena jumlah penduduk Indonesia termasuk ke dalam lima besar negara di dunia yang berpenduduk padat.

Keuntungan tersebut belum termanfaatkan secara optimal maupun maksimal karena faktanya sumber daya alam yang melimpah tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja atau dengan kata lain tidak mengurangi angka pengangguran. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait.

Salah satu sumber daya alam yang belum termanfaatkan dengan baik adalah sumber daya perairan, baik perairan tawar, payau, dan laut. Sumber daya tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media perikanan budidaya. Hal ini juga didorong oleh program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program revolusi biru yang menargetkan produksi perikanan budidaya Indonesia naik tiga kali lipat, yaitu sebesar 5,38 juta ton pada tahun 2010 dan 16,89 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 353%, sedangkan untuk sektor perikanan tangkap tidak begitu diandalkan karena dari tahun ke tahun penangkapan menurun atau terjadi *overfishing* (KKP, 2010). Komoditas yang dibudidayakan adalah rumput laut, lele, patin, nila, kerapu, kakap, mas, dan gurami sampai kepada udang dan bandeng yang banyak dieksport dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk pasar dunia. Teknologi untuk budidaya komoditas tersebut pun mudah untuk dikuasai oleh masyarakat.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah dimiliki dan ditunjang pula oleh target yang jelas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan demikian, seharusnya target produksi perikanan budidaya dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat khususnya petani ikan yang terjun langsung. Permasalahannya adalah kurang optimalnya peranan KKP karena hanya menargetkan persentase saja dan tidak diikuti dengan jaminan apabila terjadi *over supply* mengingat produk perikanan ini bersifat *high risk*, serta jaminan lainnya seperti mudahnya akses pasar, modal awal bagi petani ikan, misalnya semacam KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta birokrasi yang mudah baik untuk akses ke perbankan maupun birokrasi pendirian usaha.

Atas permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu tindakan yang konkret dan terintegrasi dari pemerintah dalam hal ini KKP, sektor perbankan, dan petani. Indikator dari keberhasilan tersebut adalah tercapainya target produksi perikanan budidaya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tujuan

Memberikan gagasan yang dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam memaksimalkan sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat petani.

GAGASAN

Kondisi Perikanan Dunia

Penangkapan berlebih atau *over fishing* sudah menjadi kenyataan pada berbagai perikanan tangkap di dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan 75% dari perikanan laut dunia sudah tereksplorasi penuh, mengalami tangkap lebih atau stok yang tersisa bahkan sudah terkurus, hanya 25% dari sumberdaya masih berada pada kondisi tangkap kurang (FAO, 2002). Total produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2000 ternyata 5% lebih rendah dibanding puncak produksi pada tahun 1995 (tidak termasuk Cina, karena unsur ketidak-pastian dalam statistik perikanan mereka). Oleh karena itu produktivitas perikanan yang kini diharapkan adalah dari sektor budidaya.

Kondisi seperti ini memberikan pelajaran bahwa tidak bisa terus menerus bergantung kepada yang disediakan oleh alam, tetapi perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atau paling tidak memberikan waktu kepada alam untuk *recovery*. Pemerintah dalam hal ini KKP telah mengantisipasi dengan mencanangkan peningkatan target produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 353%. KKP perlu menyediakan sarana dan prasarana produksi untuk mencapai target tersebut. Sarana dan prasarana yang ada harus sepenuhnya mendukung kegiatan produksi, misalnya mempermudah izin pembukaan lahan tambak, membuka atau memperbaiki jalur transportasi, regulasi harga dan ketersediaan pakan ikan.

Kesejahteraan Petani Ikan dan Masyarakat Umum

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009, melansir persentase penduduk miskin di Indonesia meliputi kota dan desa mencapai 14,15% atau sekitar 32,53 juta orang. Menurut BPS, angka kemiskinan di sektor pertanian mencapai 56,1 persen, jauh di atas industri (6,77 persen). Sektor permodalan adalah salah satu dari sekian perkara yang mempengaruhi sulitnya petani memperbaiki nasib mereka.

Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI, 2007), salah satu contohnya di Kabupaten Sukabumi, tercatat sekitar 16.000 keluarga nelayan tradisional dimana 95% adalah nelayan miskin. Sementara sisanya adalah para *taweu* atau juragan pemilik perahu yang hidupnya sejahtera. Nelayan juga seringkali terbelit utang kepada para juragan, selain cicilan yang membengkak, nelayan juga ditekan dengan harga jual yang dipotong oleh para juragan. Belum lagi datangnya perusahaan besar kerap “menyedot” dan tidak menyisakan kekayaan alam bagi para nelayan kecil. Di NTT sebagai contoh, enam perusahaan asing budidaya mutiara, salah satunya PT Kyoko Shinju Indonesia dan satu perusahaan penangkapan ikan cakalang dan tuna setiap tahunnya mengeruk kekayaan laut NTT. Sementara itu, rakyat NTT malah menjadi masyarakat termiskin di Indonesia dan bahkan menderita wabah kelaparan baru-baru ini.

Pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini dengan cara menetapkan harga jual minimum komoditas perikanan dari petani/nelayan langsung, sehingga

nelayan tidak dirugikan lagi. Memang pemerintah kurang memperhatikan harga-harga komoditas perikanan dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya, misalnya harga gabah, harga beras, dan harga lainnya yang disubsidi. Selain itu juga, pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang membatasi jumlah ikan yang dapat diambil dari alam oleh pihak swasta, atau menciptakan rantai produksi dimana nelayan/petani sebagai produsen tingkat I bagi produsen sebelumnya, sehingga nelayan dapat akses untuk memasarkan produknya.

Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber-Sumber Permodalan

Walaupun bukan satu-satunya faktor produksi usaha pertanian, tapi dalam batas-batas tertentu modal merupakan faktor kritis. Tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menghambat petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha tani.

Kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berkembang baik akibat terlalu banyaknya campur tangan yang cenderung berlebihan dari sistem birokrasi pemerintah. Tindakan ini, pada kenyataannya telah melumpuhkan sebagian kelembagaan lokal yang selama ini berkembang dan berperanan di masyarakat dalam pemerataan pendapatan, termasuk kelembagaan pembiayaan pertanian (Sudaryanto dan Syukur, 2000 *dalam* Nurmanaf, 2007). Lemahnya peranan kelembagaan pembiayaan pertanian tersebut membawa konsekuensi semakin terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Syukur *et al.*, 2003 *dalam* Nurmanaf, 2007). Disamping itu, campur tangan pemerintah yang berlebihan juga menciptakan kondisi informasi yang tidak simetris antara sebagian besar masyarakat (dalam hal ini petani) dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini membawa implikasi yang luas berupa rendahnya aksesibilitas pelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, informasi pasar dan lain sebagainya (Syukur dan Windarti, 2001 *dalam* Nurmanaf, 2007).

Sumber pembiayaan lembaga formal yang menjadi pilihan dan dekat dengan masyarakat di pedesaan adalah bank pemerintah khususnya Bank BRI. Namun bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BPD melalui BPR dan BKK dan lain-lain juga dapat diakses masyarakat. Meskipun di Bank BRI tingkat wilayah penyaluran kredit untuk sektor pertanian relatif kecil, tapi di tingkat Unit Desa porsi kredit mikro pertanian, di beberapa kasus terdapat dalam porsi yang relatif besar. Sementara, kredit mikro informal disalurkan melalui pihak swasta sebagai pelepas uang, seperti bank *Plecit/Kangkung* (di NTB) dan bank *Tuyul* (di Jateng). Lembaga-lembaga informal ini umumnya mudah diakses oleh siapa saja yang memerlukan, secara cepat, jarak dekat, waktu dan besar pinjaman sesuai kebutuhan, dengan prosedur sederhana dan tanpa agunan, tapi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Hubungan pinjaman demikian lebih didasarkan pada kepercayaan ketimbang jaminan seperti halnya institusi pembiayaan komersial (Nurmanaf, 2007).

Seharusnya pemerintah bisa berperan lebih banyak melalui bank-bank formal dibandingkan dengan sumber pembiayaan informal karena pemerintah punya wewenang untuk melakukan hal itu, misalnya menyediakan kredit bagi

petani yang mudah untuk diakses karena pemerintah harus sadar bahwa mayoritas petani/nelayan kecil di Indonesia berpendidikan rendah, sehingga mereka enggan berurusan dengan birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk suatu bank khusus pertanian yang fungsinya untuk menyalurkan dana ke para petani/nelayan tanpa bunga tinggi atau tanpa agunan. Pemerintah juga bisa menciptakan suatu program wirausaha yang ada dalam lembaga formal tetapi tidak sama dengan status peminjam lainnya. Program wirausaha ini bisa disertai dengan pembimbingan dari segi manajemen ataupun teknis.

Pola Pikir Petani

Berbagai program pembiayaan mikro telah direalisasikan baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti Pemda/Bappeda dan Departemen Pertanian. Namun, kredit tersebut sering kali tidak terserap karena berbagai faktor, antara lain tidak tepat waktu. Selain itu adanya pandangan pihak-pihak tertentu beranggapan bahwa kredit program merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.

Pemahaman seperti ini mungkin dapat diatasi dengan pendekatan secara persuasif, misalnya melalui pembinaan usaha yang menitikberatkan kepada pengembangan diri dan usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang dipinjamkan.

Perhatian Pemerintah Dewasa Ini

Perhatian pemerintah dalam hal ini melalui kontribusi perbankan pada sektor pertanian. Selama lima tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian tidak beranjak pada angka 6 persen dari total penyaluran kredit nasional. Tahun ini Bank Indonesia mengumumkan portofolio kredit pertanian hanya 5,5 persen dari total kredit. Padahal merekalah *the real investor* bagi sektor pangan. Kebun karet, misalnya, seluas 3,5 juta hektare merupakan investasi murni masyarakat, kebun kelapa 3,7 juta hektare, dan jutaan hektare komoditas perkebunan lain. Lihat juga para petani yang mencetak sawah lebih dari 7 juta hektare dengan produksi sekitar 50 juta ton gabah. Investasi yang nilainya triliunan rupiah ini tanpa suntikan BLBI atau *bailout* (Tempo, 2010).

Selama ini memang ada beberapa program permodalan untuk masyarakat pedesaan dan kelompok tani/nelayan, seperti bantuan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), program Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dan sebagainya. Tahun ini, sasaran penerima PUAP mencakup 10 ribu gapoktan/desa dengan total anggaran Rp 1,18 triliun serta pemberdayaan 1.538 LM3 dengan total anggaran Rp 306,74 miliar. Dengan model bantuan, ada persoalan inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas. Anggaran seperti ini juga sangat rawan dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Laporan sejumlah kalangan menyebutkan, dana PUAP yang seharusnya mereka terima Rp 100 juta hanya sampai sekitar Rp 70 juta (Tempo, 2010).

Seharusnya pemerintah sadar bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang mata pencaharian penduduknya mayoritas dari sektor pertanian. Oleh karena itu, kredit untuk sektor pertanian harus ditingkatkan lagi, tidak cukup 5,5% dari total kredit. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengatur anggaran, dan tentunya harus mengedepankan program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, atau program-program itu harus pro rakyat.

Peranan Pihak Terkait

Pihak-pihak yang berperan dalam pencapaian target produksi perikanan dari sektor budidaya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat petani adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini KKP, berperan dalam penentuan kebijakan-kebijakan (regulator) yang dapat mendorong dan memihak pada sektor pertanian demi kesejahteraan masyarakat petani. KKP harus menyediakan sarana dan prasarana produksi, selain itu pemerintah harus menciptakan iklim yang baik untuk usaha.
2. Perbankan, berperan dalam penyaluran sumber modal kepada pelaku usaha/petani. Birokrasi ditingkat perbankan harus dihapuskan atau disesuaikan dengan kondisi petani yang umumnya berpendidikan rendah
3. Petani, berperan sebagai ujung tombak dari alat pencapaian target KKP yang sekaligus menjadi objek program pemerintah yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Petani/nelayan harus dibina dalam rangka pengembangan usaha dan pengembangan diri.

Langkah-Langkah Strategis Pengimplementasian Gagasan

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan:

1. Merubah kebijakan orientasi dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam rangka pencapaian target produksi.
2. Memangkas berbagai birokrasi yang berbelit-belit yang dapat mengurungkan niat pelaku usaha untuk berusaha, dan untuk menghindari berbagai praktik korupsi, misalnya dari sektor perbankan dan administrasi pendirian usaha.
3. Memperluas akses petani/pelaku usaha ke sumber-sumber modal.
4. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya menargetkan persentase yang ingin dicapai saja, tetapi harus ada program yang terintegrasi antara target yang ingin dicapai dengan faktor pendukungnya.
5. Melakukan pendekatan persuasif kepada petani bahwa modal yang diberikan untuk dikembalikan lagi, dan perlu adanya kebijakan tertentu

- bila usaha mengalami kegagalan serta dilakukan pembinaan untuk usaha jangka panjang.
6. Perlu dibentuk bank khusus pertanian yang peranannya memberikan modal usaha tetapi tidak dibebani dengan bunga yang tinggi, dan prosedur yang berbelit-belit.

KESIMPULAN

Target KKP akan tercapai bila semua *stakeholder* yang terkait dapat bekerjasama secara sinergis baik antara pemerintah, perbankan, dan petani sehingga akan tercapai kesejahteraan bagi masyarakat petani. Gagasan dapat diimplementasikan oleh penulis dari lingkungan terkecil karena untuk mengubah sesuatu yang besar dimulai dari hal yang terkecil, dengan kata lain perlu ada kesadaran diri bahwa pemasalahan ini bisa dituntaskan dengan kerjasama dari semua pihak terkait. Gagasan ini diharapkan dapat membuka mata berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2009. Kemiskinan. www.bps.go.id. [22 Maret 2010].
- FAO, 2002. The state of the world fisheries and aquaculture 2002. FAO, Rome: FAO, 150 pp.
- KKP. 2009. Kelautan dan perikanan dalam angka.
- Nurmanaf AR. 2007. Lembaga Informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani. Analisis kebijakan pertanian 5(2):99-109
- SPI. 2007. Tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. www.spi.or.id. [22 Maret 2010].T
- Tempo. 2010. Petani dan Kasus Century. www.tempointeraktif.com. [22 Maret 2010].